



Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Cost Control Inklusif Untuk Mengurangi Disparitas Ekonomi

Elga Naya Maharani

STIE Kasih Bangsa, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Elga Naya Maharani

✉ elganayaa@gmail.com

History:

Submitted: 12-11-2025

Revised: 20-12-2025

Accepted: 21-12-2025

Keyword:

Inclusive Cost Control; Public Financial Management; Regional Economic Disparity; Value for Money; Productive Spending.

Kata Kunci:

Cost Control Inklusif; Pengelolaan Keuangan Daerah; Disparitas Ekonomi Regional; Value for Money; Belanja Produktif.

Abstract

This research proposes an Inclusive Cost Control (CCI) framework to address fiscal decentralization failures in reducing Indonesia's regional economic disparities. Although authority delegation aims to enhance efficiency, budget allocation ineffectiveness and low productive spending remain structural challenges. Utilizing a Systematic Literature Review and Barro's growth model analysis, this study integrates Cost Accounting systems with Performance-Based Budgeting within the Public Financial Management framework. Findings indicate that the CCI strategy enables local governments to rationalize non-critical operational costs to protect physical and human capital investments. CCI implementation is projected to increase public service effectiveness by 25% and infrastructure quality by 30%. By optimizing Value for Money, CCI serves as a strategic policy instrument to ensure pro-equity productive spending allocations. In conclusion, transitioning from short-term cost-cutting to structural cost control is vital to minimize the trade-off between fiscal efficiency and regional equity for the achievement of inclusive, fair, and sustainable regional economic development.

Abstrak

Penelitian ini mengusulkan kerangka kerja Cost Control Inklusif (CCI) untuk mengatasi kegagalan desentralisasi fiskal dalam mengurangi disparitas ekonomi regional di Indonesia. Meskipun pelimpahan wewenang bertujuan meningkatkan efisiensi, inefisiensi alokasi anggaran dan rendahnya belanja produktif tetap menjadi tantangan struktural. Melalui pendekatan Systematic Literature Review dan analisis model pertumbuhan Barro, kajian ini mengintegrasikan sistem Akuntansi Biaya dengan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi CCI memungkinkan pemerintah daerah melakukan rasionalisasi biaya operasional non-kritis guna melindungi investasi modal fisik dan manusia. Implementasi CCI diproyeksikan mampu meningkatkan efektivitas layanan publik sebesar 25% dan kualitas infrastruktur sebesar 30%. Dengan mengoptimalkan Value for Money, CCI berfungsi sebagai instrumen kebijakan strategis untuk menjamin alokasi belanja produktif yang pro-pemerataan. Kesimpulannya, transformasi dari pemotongan biaya jangka pendek menuju pengendalian biaya struktural sangat krusial untuk meminimalkan trade-off antara efisiensi fiskal dan ekuitas regional demi pencapaian pembangunan ekonomi daerah yang inklusif serta adil dan berkelanjutan.



Copyright © 2025 by Journal of State Economic Research.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

[doi https://doi.org/10.65101/jser.v1i2.179](https://doi.org/10.65101/jser.v1i2.179)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia, yang secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001, didasarkan pada premis teoritis bahwa pelimpahan kewenangan akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik. Teori *fiscal federalism* menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah (Pemda) memiliki keunggulan informasi asimetris mengenai preferensi masyarakat lokal, memungkinkan penyediaan barang publik yang lebih efisien dan sesuai dengan keinginan masyarakat.¹ Dalam konteks ini, Pemda diharapkan dapat menyediakan barang publik dengan kuantitas yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan penyediaan terpusat, sehingga menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang *pro* pemerataan.¹

Namun, disparitas ekonomi regional, yang merujuk pada distribusi sumber daya dan peluang ekonomi yang tidak merata di berbagai wilayah geografis, tetap menjadi tantangan struktural yang meluas dan persisten. Disparitas ini termanifestasi dalam ketidaksetaraan pendapatan, perbedaan tingkat pekerjaan, dan akses terhadap infrastruktur dasar. Persistennya ketimpangan ini dapat memicu tekanan sentrifugal, mengancam kohesi nasional, dan menghambat tata kelola pemerintahan yang stabil.² Kegagalan alokasi sumber daya secara efisien di tingkat daerah memperkuat disparitas ini, karena hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya menyokong pertumbuhan ekonomi dan mengoreksi ketimpangan pembangunan regional di beberapa wilayah, seperti di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Meskipun tujuan desentralisasi adalah efisiensi, studi Nur Farida di KTI mengindikasikan bahwa kewenangan anggaran seringkali belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya alokasi belanja produktif, di mana proporsi belanja modal (yang vital untuk infrastruktur) cenderung menurun dan berada di bawah target 30%. Lemahnya kualitas SDM perencana dan pengelola anggaran memperburuk situasi ini, menghambat upaya Pemda dalam menyediakan barang publik yang memadai

¹ Lusia Lestina Halawa et al., "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Keuangan Negara," *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (January 13, 2025): 43–53, <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102>.

² Suparman Suparman and Muzakir Muzakir, "Regional Inequality, Human Capital, Unemployment, and Economic Growth in Indonesia: Panel Regression Approach," *Cogent Economics & Finance* 11, no. 2 (October 9, 2023), <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2251803>.

untuk mendorong pertumbuhan yang *pro* pemerataan.³

Dalam menghadapi tantangan ini, Pemda di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada tekanan fiskal yang meningkat, didorong oleh kenaikan biaya operasional (upah dan layanan kesehatan) dan stagnasi pendapatan.⁴ Respons Pemda seringkali berupa tindakan *cost-cutting* jangka pendek, seperti pembekuan perekrutan atau penundaan belanja pemeliharaan dan IT. Namun, langkah-langkah darurat ini hanya menawarkan perbaikan sementara dan justru melemahkan efisiensi operasional dan kapasitas layanan publik dalam jangka panjang.⁵ Apabila Pemda tidak dapat mengendalikan arus dana secara efektif, analisis belanja yang berarti menjadi mustahil, membuka pintu bagi inefisiensi, pemborosan, dan korupsi.⁶

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran dari *cost-cutting* insidental menuju Strategi Pengendalian Biaya Struktural atau *Cost Control Inklusif* (CCI), yang diintegrasikan ke dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Publik (*Public Financial Management* atau PFM) untuk mencapai *Value for Money* (VFM) secara berkelanjutan.⁶ Pengendalian biaya yang kuat merupakan prasyarat manajerial dan teknis yang memvalidasi prinsip-prinsip desentralisasi fiskal dengan memastikan alokasi sumber daya diarahkan pada maksimalisasi kesejahteraan lokal.

Studi Paso et al (2025) mengidentifikasi pentingnya akuntansi biaya dalam PFM untuk meningkatkan kredibilitas anggaran dan akuntabilitas.⁷ Studi lain oleh Sosvilla-Rivero et al (2025) fokus pada dampak makro agregat belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi,⁸ serta studi Darmawanti et al (2025) tentang tren dalam riset keuangan pemerintah daerah yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan

³ Nur Farida, "Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Ketimpangan Pembangunan Regional Di Kawasan Timur Indonesia" (Universitas Brawijaya, 2021), [https://repository.ub.ac.id/id/eprint/191932/2/Nur Farida.pdf](https://repository.ub.ac.id/id/eprint/191932/2/Nur%20Farida.pdf).

⁴ David N. Ammons and Dale J. Roenigk, *Tools for Decision Making* (London: Routledge, 2021), <https://doi.org/10.4324/9781003129431>.

⁵ Khoirul Aswar, "Financial Performance of Local Governments in Indonesia," *European Journal of Business and Management Research* 4, no. 6 (December 12, 2019): 1–6, <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.164>.

⁶ Farhan Shidqi and Zef Arfiandy, "Good Governance and Corruption in Local Governments: The Role of Internal Control and Audit," *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 29, no. 1 (June 23, 2025): 1–11, <https://doi.org/10.20885/jaa.vol29.iss1.art1>.

⁷ Lorena Rivero del Paso, Chloe Cho, and Ramon Narvaez Terron, "Making Cost Data Work for Public Financial Management," *IMF Working Papers* 2025, no. 159 (August 2025): 1, <https://doi.org/10.5089/9798229021470.001>.

⁸ Simón Sosvilla-Rivero, María del Carmen Ramos-Herrera, and Juan J. Rubio-Guerrero, "Public Expenditure and Economic Growth: Further Evidence for the European Union," *Economies* 13, no. 3 (February 21, 2025): 60, <https://doi.org/10.3390/economies13030060>.

keberlanjutan fiskal.⁹ Selain itu studi Haryati et al (2025) menjelaskan terdapat analisis yang menunjukkan korelasi positif antara efisiensi belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur mengenai bagaimana mekanisme *cost control* spesifik yang didorong oleh data biaya yang rinci dan terstruktur dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk secara eksplisit dan paksa menjamin alokasi belanja menuju kategori produktif yang bertujuan mengurangi ketimpangan. Artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengusulkan kerangka Cost Control Inklusif (CCI). *Novelty* utama penelitian ini adalah integrasi sistem *cost accounting* dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBB) sebagai variabel intervensi yang dirancang untuk menjembatani *trade-off* antara efisiensi fiskal dan ekuitas regional. Dengan memaksimalkan efisiensi unit belanja produktif melalui CCI, Pemda dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas layanan publik (hingga 25%) dan kualitas infrastruktur (hingga 30%) di wilayah yang paling membutuhkan, sekaligus memastikan bahwa biaya laten dari PFM yang lemah yaitu amplifikasi disparitas regional dapat diminimalkan.

Strategi pengendalian biaya harus bertransformasi menjadi model Cost Control Inklusif (CCI) yang mengintegrasikan sistem Akuntansi Biaya dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBB) untuk memaksimalkan *Value for Money*. Model CCI ini memungkinkan pemerintah daerah secara strategis melindungi dan mengoptimalkan belanja produktif (infrastruktur, pendidikan) yang memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan efektivitas layanan publik, sehingga secara efektif mengurangi disparitas regional yang disebabkan oleh alokasi anggaran yang tidak efisien.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah:

- a. Bagaimana strategi pengendalian biaya yang efektif dapat diintegrasikan dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (PFM) untuk memaksimalkan *Value for Money* (VFM) dan meningkatkan kredibilitas anggaran daerah?

⁹ Darmawati, Elis Mediawati, and Syarifuddin Rasyid, "New Trends and Directions in Local Government Finance Research: A Bibliometric Analysis," *Public and Municipal Finance* 13, no. 1 (June 28, 2024): 137–49, [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(1\).2024.11](https://doi.org/10.21511/pmf.13(1).2024.11).

¹⁰ Dwi Citra Haryati et al., "Analisis Efisiensi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia : Pendekatan Data Panel," *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 3 (May 20, 2025): 139–53, <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2185>.

- b. Bagaimana kerangka kerja Cost Control Inklusif (CCI) dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melindungi, dan mengoptimalkan alokasi belanja produktif (berdasarkan model Barro) yang secara langsung berfungsi sebagai katalis untuk mengurangi disparitas ekonomi regional?
- c. Apa implikasi manajerial dan kebijakan dari penerapan strategi pengendalian biaya struktural terhadap efisiensi penyediaan barang publik dan mitigasi risiko ketimpangan pembangunan di tingkat regional?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan desain *Systematic Literature Review* (SLR) dan Analisis Konseptual-Teoretis. Teknik analisis yang digunakan adalah Sintesis Konseptual dan Pemodelan Teoretis. Kajian ini melibatkan analisis tematik terhadap studi PFM internasional (terutama dari IMF dan World Bank) dan studi ekonomi regional di Indonesia.

Untuk membangun kerangka kerja teoritis belanja produktif yang mengurangi disparitas, analisis ini mengadopsi model pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Barro (1991), digunakan untuk klasifikasi dan evaluasi dampak fungsional belanja publik.¹¹ Data dan referensi utama diambil dari literatur akademis yang terindeks Scopus, serta laporan institusional kunci yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024, fokus pada topik PFM modern, akuntansi biaya publik, efisiensi belanja daerah (misalnya, studi *Data Envelopment Analysis* atau DEA), dan keuangan pemerintah daerah.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Teori: Tinjauan Kritis Belanja Publik dan Ketimpangan

Desentralisasi fiskal secara ideal menghasilkan peningkatan kesejahteraan sosial karena memungkinkan pemerintah daerah menyediakan barang publik sesuai dengan preferensi lokal yang beragam.¹² Namun, upaya untuk mengurangi disparitas regional, seringkali melalui kebijakan berbasis tempat (*place-based policies*), secara inheren menghadapi *trade-off* antara ekuitas (pemerataan) dan efisiensi alokasi.¹³ Jika sumber daya dialokasikan ke wilayah tertinggal yang memiliki basis produktivitas rendah,

¹¹ Robert J. Barro, "Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth," *Journal of Political Economy* 98, no. 5, Part 2 (October 1990): S103–25, <https://doi.org/10.1086/261726>.

¹² Farida, "Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Ketimpangan Pembangunan Regional Di Kawasan Timur Indonesia."

¹³ Holger Floerkemeier, Nikola Spatafora, and Anthony Venables, "Regional Disparities," in *How to Achieve Inclusive Growth* (Oxford University Press/Oxford, 2021), 613–44, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192846938.003.0017>.

efisiensi ekonomi nasional mungkin menurun, meskipun tujuan pemerataan terpenuhi.

Strategi pengendalian biaya harus dirancang untuk meminimalkan *trade-off* ini. Persoalan utama bukan sekadar tingkat belanja, tetapi efisiensi pengganda belanja (*spending multiplier*). Jika suatu pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan dan pengeluaran yang tinggi masih menunjukkan ketimpangan yang tinggi (diukur dari Gini Ratio), hal ini menunjukkan adanya inefisiensi *input-output*. Berdasarkan temuan bahwa sistem fiskal Indonesia memiliki dampak yang relatif sederhana dalam mengurangi ketidaksetaraan dibandingkan negara lain, strategi CCI bertujuan untuk memaksimalkan VFM, memastikan bahwa setiap Rupiah yang dibelanjakan di wilayah tertinggal menghasilkan output infrastruktur atau modal manusia yang optimal.¹⁴

Dalam kerangka pertumbuhan endogen, Barro (1991) membagi pengeluaran pemerintah berdasarkan dampaknya terhadap pertumbuhan. Pengeluaran yang diklasifikasikan sebagai "produktif" (misalnya, investasi modal, belanja pendidikan/GF09, kesehatan/GF07) cenderung mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, pengeluaran konsumtif yang tinggi atau "unproduktif" berisiko menurunkan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).¹⁵

Analisis empiris menunjukkan bahwa dampak pengeluaran juga dipengaruhi oleh kategori fungsional dan eksekusinya. Studi menemukan bahwa belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik umum (GF01) berkontribusi positif terhadap output ekonomi jangka panjang. Sementara itu, kategori seperti perlindungan lingkungan (GF05) dan ketertiban publik (GF03) ditemukan memiliki efek *dampening* (negatif) jangka panjang terhadap PDB riil.¹⁰ Bahkan, belanja untuk urusan ekonomi (GF04) dapat memiliki dampak negatif jangka pendek yang signifikan, kemungkinan disebabkan oleh desain kebijakan yang buruk, insentif yang mendistorsi pasar, atau tidak adanya pengembalian produktivitas yang memadai.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa sekadar melabeli suatu fungsi sebagai "produktif" tidaklah cukup; kualitas desain dan eksekusi kebijakan sangat menentukan keberhasilannya.

Pengelolaan keuangan daerah yang bijaksana dan strategis terbukti memiliki korelasi positif yang kuat dengan kinerja pemerintah daerah. Studi Mike Nofrita et al (2024) menunjukkan bahwa alokasi belanja yang tepat dapat meningkatkan efektivitas

¹⁴ Agussalim Agussalim et al., "The Path to Poverty Reduction: How Do Economic Growth and Fiscal Policy Influence Poverty Through Inequality in Indonesia?," *Economies* 12, no. 12 (November 21, 2024): 316, <https://doi.org/10.3390/economies12120316>.

¹⁵ Barro, "Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth."

penyediaan layanan publik sebesar 25%, terutama pada aksesibilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Selain itu, manajemen pengeluaran yang baik berkorelasi dengan peningkatan kualitas infrastruktur sebesar 30% di wilayah dengan sumber pendapatan yang memadai.¹⁶ Korelasi positif dan signifikan antara skor efisiensi belanja, yang diukur dengan DEA, dan pertumbuhan ekonomi daerah juga menegaskan bahwa semakin efisien belanja Pemda, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi regional yang dicapai.¹⁷

Inefisiensi dalam PFM daerah memiliki biaya tersembunyi, yaitu amplifikasi disparitas regional. Ketika sistem PFM tidak mampu mengendalikan biaya atau memprioritaskan investasi produktif, sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pertumbuhan yang merata justru mengalami disipasi. Akibatnya, barang publik esensial gagal terdeliver di area yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, *cost control* struktural, melalui penegakan transparansi data biaya, adalah tindakan fundamental yang bersifat anti-korupsi dan pro-ekuitas, menjadi prasyarat teknis untuk validasi kesuksesan desentralisasi.

2. Strategi Pengendalian Biaya Inklusif (CCI) dalam PFM

Strategi Cost Control Inklusif (CCI) mewakili pergeseran paradigma, bergerak dari pengurangan biaya reaktif menuju manajemen biaya proaktif yang terstruktur. CCI adalah model PFM terintegrasi yang bertujuan mencapai penghematan struktural dan berkelanjutan melalui optimalisasi *Value for Money* (VFM) sambil secara eksplisit meningkatkan alokasi ke belanja yang mendukung ekuitas regional.

Pengendalian biaya modern di sektor publik menjadikan akuntansi biaya (*cost accounting*) sebagai landasan untuk mencapai VFM, sesuai dengan praktik PFM terbaik di berbagai negara. Pemahaman yang rinci mengenai biaya barang dan jasa yang diberikan adalah landasan untuk mencapai VFM. Ketika diintegrasikan ke dalam praktik PFM, *cost accounting* memperkuat kredibilitas anggaran dan menjadi masukan penting bagi indikator efisiensi dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBB).¹⁸

Integrasi ini memungkinkan Pemda untuk secara eksplisit:

- a. Menghubungkan sumber daya yang dialokasikan dengan hasil (*outcomes*)

¹⁶ Mike Nofrita et al., "Systematic Literature Review: The Influence of Regional Expenditure and Regional Revenue on Local Government Performance," *OPSearch: American Journal of Open Research* 3, no. 6 (June 21, 2024): 147–54, <https://doi.org/10.58811/opsearch.v3i6.121>.

¹⁷ Siti Nur Reskiyawati Said, Anisatun Humairah Rais, and Intan Timur, "Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa," *Advances in Management & Financial Reporting* 3, no. 3 (September 27, 2025): 1111–28, <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.637>.

¹⁸ Paso, Cho, and Terron, "Making Cost Data Work for Public Financial Management."

yang diharapkan.

- b. Mengevaluasi efektivitas biaya (*cost-effectiveness*) program.
- c. Meningkatkan manajemen pengadaan melalui *life-cycle costing* dan evaluasi tawaran yang lebih terinformasi.

Data biaya yang dihasilkan CCI tidak hanya digunakan untuk audit keuangan, tetapi juga harus diintegrasikan dengan audit kinerja atau VFM, sebagaimana dilakukan oleh lembaga audit tertinggi di beberapa negara.¹⁹ Hal ini penting untuk mengatasi risiko kegagalan desain kebijakan, di mana belanja yang secara fungsional produktif dapat menjadi tidak efektif karena eksekusi yang buruk.

CCI menekankan perlunya transformasi struktural untuk mencapai pengurangan biaya yang permanen, alih-alih bergantung pada "perbaikan" jangka pendek.⁵ Pendekatan ini mencakup rekayasa ulang proses dan peningkatan efisiensi operasional, didukung oleh teknologi baru:²⁰

- a. Otomasi dan Kecerdasan Buatan (AI): Penerapan teknologi, termasuk AI dan Gen AI, dapat secara fundamental mengubah struktur biaya penyediaan layanan, memungkinkan otomatisasi pengumpulan data, dan meningkatkan granularitas. Penggunaan *machine learning* juga dieksplorasi untuk mendeteksi anomali dan inefisiensi, yang secara tidak langsung berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi.
- b. Pengawasan Anggaran Real-Time: Pemerintah daerah harus memastikan semua transaksi diarahkan melalui proses pembelian yang terpusat dan efisien, memungkinkan staf untuk memantau situasi anggaran secara akurat dan tepat waktu. Namun, proses persetujuan ini harus dirancang agar tidak menjadi hambatan birokrasi yang justru meningkatkan biaya operasional.

Untuk menstabilkan alokasi pada proyek-proyek penting, CCI mengharuskan penyusunan perencanaan keuangan multi-tahun. Rencana ini memberikan visibilitas yang lebih baik mengenai dampak keputusan fiskal saat ini terhadap jalur fiskal di masa depan, memungkinkan Pemda untuk menjaga komitmen investasi modal jangka panjang. Tabel 1 merangkum pergeseran paradigma yang dianjurkan oleh CCI:

Tabel 1: Pergeseran Paradigma dari Pengurangan Biaya Jangka Pendek ke

¹⁹ George M. Guess and James D. Savage, "Comparative Budgeting," in *Comparative Public Budgeting* (Cambridge University Press, 2021), 1-32, <https://doi.org/10.1017/9781108182263.001>.

²⁰ Swaprava Nath and Tuomas Sandholm, "Efficiency and Budget Balance," in *Web and Internet Economics*, 2016, 369-83, https://doi.org/10.1007/978-3-662-54110-4_26.

Pengendalian Biaya Strategis (CCI)

Dimensi Pengendalian	Pendekatan Tradisional (Cost Cutting)	Pendekatan Strategis (Cost Control Inklusif/PFM VFM)
Fokus Waktu	Jangka Pendek (Pengurangan Arus Kas Segera)	Jangka Panjang (Transformasi Struktural)
Alat Utama	Pembekuan/Penundaan Belanja (Hiring Freezes, Delaying Maintenance)	Integrasi Akuntansi Biaya dan PBB (Cost Accounting & PBB)
Tujuan Akhir	Keseimbangan Anggaran Sesaat	Mencapai Nilai Uang (Value for Money) dan Efisiensi Operasional
Dampak Jangka Panjang	Menurunkan Efisiensi dan Kapasitas Layanan	Memperkuat Kredibilitas Anggaran, Akuntabilitas, dan Ekuitas Regional

3. Mekanisme Optimalisasi Belanja Produktif untuk Koreksi Disparitas

Tujuan akhir CCI adalah memastikan bahwa penghematan biaya operasional dialihkan secara struktural untuk memperkuat belanja yang secara langsung berkontribusi pada pengurangan disparitas, yaitu Belanja Produktif Kritis. Belanja ini mencakup investasi modal fisik (infrastruktur) dan modal manusia (pendidikan dan kesehatan), yang secara teori dan empiris terbukti mendorong pertumbuhan.²¹

CCI harus memaksa konversi tabungan operasional yang tidak efisien menjadi investasi ekuitas jangka panjang. Kegagalan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja modal sesuai target (misalnya, proporsi di bawah 30% di KTI) dapat menghambat akumulasi modal fisik yang krusial.²² Dengan data biaya yang transparan, CCI melindungi belanja-belanja ini, memastikan bahwa setiap unit biaya di belanja produktif mencapai *output* maksimal, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi positif dan signifikan antara efisiensi belanja dan pertumbuhan ekonomi daerah.²³

Tabel 2 mengilustrasikan bagaimana CCI memprioritaskan belanja berdasarkan

²¹ Sosvilla-Rivero, Ramos-Herrera, and Rubio-Guerrero, "Public Expenditure and Economic Growth: Further Evidence for the European Union."

²² Farida, "Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Ketimpangan Pembangunan Regional Di Kawasan Timur Indonesia."

²³ Said, Rais, and Timur, "Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa."

dampak strukturalnya terhadap pertumbuhan dan pemerataan.

Tabel 2: Klasifikasi Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Dampak Jangka Panjang terhadap Pertumbuhan dan Pemerataan

Kategori Belanja	Contoh Fungsional Kritis	Dampak Teoritis/Empiris	Implikasi Pengendalian Biaya Inklusif (CCI)
Produktif Kritis	Pendidikan (GF09), Kesehatan (GF07), Infrastruktur (Belanja Modal)	Mendorong Pertumbuhan Jangka Panjang, Meningkatkan Kualitas SDM, Mengurangi Disparitas	Lindungi dan Efisienkan: Gunakan data biaya untuk memaksimalkan <i>output</i> per unit biaya.
Potensi Unproduktif/Risiko Tinggi	Belanja Urusan Ekonomi (GF04), Perlindungan Lingkungan (GF05)	Dampak ambigu/negatif jika tidak efisien, menimbulkan distorsi, atau alokasi yang salah sasaran	Audit Biaya dan Kinerja: Terapkan <i>life-cycle costing</i> dan evaluasi dampak (<i>cost-effectiveness</i>).
Konsumtif Non-Kritis	Belanja Operasional Rutin Berlebihan, Belanja Barang Jasa Administrasi	Berpotensi menghambat pertumbuhan (<i>crowding out</i>) dan mengurangi dana untuk belanja modal	Rasionalisasi Struktural: Minimalkan biaya melalui efisiensi proses (AI/Gen AI) dan <i>refocusing</i> .

CCI memberikan data yang diperlukan untuk melakukan *refocusing* dan rasionalisasi belanja secara tepat sasaran, yang merupakan langkah kunci dalam pengelolaan defisit/surplus anggaran daerah. Daripada melakukan pemotongan horizontal, data *cost accounting* memungkinkan Pemda mengidentifikasi kelebihan biaya pada operasional rutin non-kritis atau proyek dengan VFM rendah. Penghematan struktural dari rasionalisasi ini kemudian dapat dialihkan untuk membiayai belanja modal yang *pro* pemerataan.²⁴

Peningkatan efektivitas belanja juga harus mencakup belanja sosial, yang bertujuan

²⁴ Natta Sanjaya, "Kebijakan Penganggaran Daerah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten)," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 17, no. 2 (December 21, 2020): 273–90, <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608>.

langsung mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok.²⁵ Pengendalian biaya memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan transparansi dan efisiensi yang tinggi, sehingga memaksimalkan dampak intervensi pemerintah dalam mitigasi kemiskinan dan ketidaksetaraan.²⁶

Meskipun kerangka CCI menawarkan solusi teknis yang kuat, keberhasilannya sangat bergantung pada faktor manajerial dan kelembagaan. Implementasi sistem canggih seperti Akuntansi Biaya publik memerlukan investasi pada infrastruktur data, peningkatan kapasitas SDM, dan strategi manajemen perubahan yang efektif. Studi menunjukkan adanya tantangan terkait ketersediaan data, kompleksitas organisasi, dan resistensi budaya terhadap perubahan dalam implementasi sistem evaluasi kinerja dan biaya.²⁷ Oleh karena itu, keberhasilan CCI tidak hanya terletak pada keahlian teknis PFM, tetapi juga pada komitmen politik yang kuat untuk mengatasi resistensi internal dan menjamin bahwa data biaya yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk keputusan alokasi yang pro-ekuitas.

4. Implikasi Manajerial dan Kebijakan

Penerapan CCI yang berhasil akan menghasilkan peningkatan kinerja yang terukur. Peningkatan efisiensi belanja secara signifikan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi regional¹² dan meningkatkan efektivitas layanan publik.¹³

Secara manajerial, dengan memaksa Pemda untuk mengungkapkan biaya riil layanan, CCI secara fundamental meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang merupakan pilar kunci tata kelola pemerintahan yang baik.⁶ Hal ini memungkinkan lembaga audit dan legislatif melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap VFM pengeluaran, meminimalkan ruang untuk inefisiensi dan korupsi.⁶

Secara kebijakan, pemerintah pusat dapat menggunakan metrik efisiensi biaya dan VFM yang dihasilkan dari CCI sebagai basis insentif fiskal. Metrik ini dapat menjadi syarat atau komponen penentu untuk pengalokasian transfer berbasis kinerja, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Perimbangan lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *money follows function*¹ dan memberikan dorongan kuat bagi Pemda untuk

²⁵ Aln Pujo Priambodo and Mohammad Ahlis Djirimu, "Government Intervention Strategy in Poverty Reduction: Study on the District and City in Indonesia Across 2016-2023," *Jurnal Bina Praja* 16, no. 3 (December 2024): 489-508, <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.489-508>.

²⁶ Haryati et al., "Analisis Efisiensi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia : Pendekatan Data Panel."

²⁷ Nurfadila Nurfadila, "Enhancing Public Financial Management through Performance Evaluation and Cost Systems," *Advances in Management & Financial Reporting* 2, no. 1 (January 31, 2024): 24-35, <https://doi.org/10.60079/amfr.v2i1.264>.

mengadopsi PFM yang lebih efisien dan *pro* pemerataan, sehingga mempercepat mitigasi disparitas regional melalui disiplin fiskal yang inklusif.

C. KESIMPULAN

Strategi Pengendalian Biaya (Cost Control) yang efektif dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus bertransformasi menjadi model Cost Control Inklusif (CCI) yang bersifat struktural dan berbasis *Value for Money*. Implementasi CCI, melalui integrasi Akuntansi Biaya dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBB), berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kegagalan desentralisasi fiskal dengan memaksa pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan melindungi belanja produktif khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang secara empiris terbukti meningkatkan efektivitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Dengan memfokuskan rasionalisasi biaya pada inefisiensi operasional dan belanja non-produktif, CCI menjadi katalis penting yang menjembatani kesenjangan antara disiplin efisiensi fiskal dan tujuan ekuitas regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, Agussalim, Nursini Nursini, Sultan Suhab, Randi Kurniawan, Salman Samir, and Tawakkal Tawakkal. "The Path to Poverty Reduction: How Do Economic Growth and Fiscal Policy Influence Poverty Through Inequality in Indonesia?" *Economies* 12, no. 12 (November 21, 2024): 316. <https://doi.org/10.3390/economies12120316>.
- Ammons, David N., and Dale J. Roenigk. *Tools for Decision Making*. London: Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003129431>.
- Aswar, Khoirul. "Financial Performance of Local Governments in Indonesia." *European Journal of Business and Management Research* 4, no. 6 (December 12, 2019): 1–6. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.164>.
- Barro, Robert J. "Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth." *Journal of Political Economy* 98, no. 5, Part 2 (October 1990): S103–25. <https://doi.org/10.1086/261726>.
- Darmawati, Elis Mediawati, and Syarifuddin Rasyid. "New Trends and Directions in Local Government Finance Research: A Bibliometric Analysis." *Public and Municipal Finance* 13, no. 1 (June 28, 2024): 137–49. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(1\).2024.11](https://doi.org/10.21511/pmf.13(1).2024.11).
- Farida, Nur. "Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Ketimpangan Pembangunan Regional Di Kawasan Timur Indonesia." Universitas Brawijaya, 2021. [https://repository.ub.ac.id/id/eprint/191932/2/Nur Farida.pdf](https://repository.ub.ac.id/id/eprint/191932/2/Nur%20Farida.pdf).
- Floerkemeier, Holger, Nikola Spatafora, and Anthony Venables. "Regional Disparities." In

- How to Achieve Inclusive Growth*, 613–44. Oxford University Press Oxford, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192846938.003.0017>.
- Guess, George M., and James D. Savage. “Comparative Budgeting.” In *Comparative Public Budgeting*, 1–32. Cambridge University Press, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781108182263.001>.
- Halawa, Lusiana Lestina, Mira Sukma, Evlin Limbong, and Wahjoe Pangestoeti. “Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Keuangan Negara.” *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (January 13, 2025): 43–53. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102>.
- Haryati, Dwi Citra, Nurpiji Nurpiji, Gustina Masitoh, Wahyu Saputra, and Taufik Subarkah. “Analisis Efisiensi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia : Pendekatan Data Panel.” *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 3 (May 20, 2025): 139–53. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2185>.
- Nath, Swaprava, and Tuomas Sandholm. “Efficiency and Budget Balance.” In *Web and Internet Economics*, 369–83, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54110-4_26.
- Nofrita, Mike, Sri Rahayu, Yudi Yudi, and Netty Herawaty. “Systematic Literature Review: The Influence of Regional Expenditure and Regional Revenue on Local Government Performance.” *OPSearch: American Journal of Open Research* 3, no. 6 (June 21, 2024): 147–54. <https://doi.org/10.58811/opsearch.v3i6.121>.
- Nurfadila, Nurfadila. “Enhancing Public Financial Management through Performance Evaluation and Cost Systems.” *Advances in Management & Financial Reporting* 2, no. 1 (January 31, 2024): 24–35. <https://doi.org/10.60079/amfr.v2i1.264>.
- Paso, Lorena Rivero del, Chloe Cho, and Ramon Narvaez Terron. “Making Cost Data Work for Public Financial Management.” *IMF Working Papers* 2025, no. 159 (August 2025): 1. <https://doi.org/10.5089/9798229021470.001>.
- Priambodo, Aln Pujo, and Mohammad Ahlis Djirimu. “Government Intervention Strategy in Poverty Reduction: Study on the District and City in Indonesia Across 2016-2023.” *Jurnal Bina Praja* 16, no. 3 (December 2024): 489–508. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.489-508>.
- Said, Siti Nur Reskiyawati, Anisatun Humairah Rais, and Intan Timur. “Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa.” *Advances in Management & Financial Reporting* 3, no. 3 (September 27, 2025): 1111–28. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.637>.
- Sanjaya, Natta. “Kebijakan Penganggaran Daerah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten).” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 17, no. 2 (December 21, 2020): 273–90. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608>.
- Shidqi, Farhan, and Zef Arfiansyah. “Good Governance and Corruption in Local Governments: The Role of Internal Control and Audit.” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 29, no. 1 (June 23, 2025): 1–11. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss1.art1>.

Sosvilla-Rivero, Simón, María del Carmen Ramos-Herrera, and Juan J. Rubio-Guerrero. "Public Expenditure and Economic Growth: Further Evidence for the European Union." *Economies* 13, no. 3 (February 21, 2025): 60. <https://doi.org/10.3390/economies13030060>.

Suparman, Suparman, and Muzakir Muzakir. "Regional Inequality, Human Capital, Unemployment, and Economic Growth in Indonesia: Panel Regression Approach." *Cogent Economics & Finance* 11, no. 2 (October 9, 2023). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2251803>.